

**Peran Penting Aspek-aspek Tata Kelola Perusahaan
Dalam Meningkatkan Tingkat Pengungkapan Wajib
Laporan Keuangan
(Studi Pada Perusahaan Sektor Pertambangan Di
Indonesia)**

Muhammad Yusuf Akbar Alfatta
Univeritas Negeri Surakarta

Sulardi
Univeritas Negeri Surakarta
sulardise2@gmail.com

***Abstract :** The influence of corporate governance aspects on mandatory disclosure financial report in Indonesia will be examined in this study to provide relevant information about it. The corporate governance aspects measured by number of commissioner member, independent commissioners proportion, president commissioner educational background, number of director member, independent directors proportion, and audit committee member. All mining industry companies from 2014 to 2016 which are listed on the Indonesia Stock Exchange (BEI) will be used on this study as population data. Secondary data obtained from financial reports and annual reports of 36 mining industry companies from 2014-2016.*

The results from multiple regression analysis in this study prove that the number of commissioner member and president commissioner educational background gives positive and significant effect to the mandatory disclosure level of financial statements of mining industry companies in Indonesia. This Results can be used by government agencies to evaluate the regulation of mandatory disclosure. In addition, the results from this study also can be used by companies to improve supervision related to corporate governance. Limitations in this study is the sample data used can not represent these results in other sectors companies.

***Keyword:** Corporate Governance Aspects, Board of Commissioners, Independent Commissioner, Board of Directors, Independent Director, Audit Committee, Mandatory Disclosure, Mining Industry Companies*

PENDAHULUAN

Di era digital saat ini, kemudahan akses informasi menuntut semakin pentingnya akuntabilitas dan transparansi informasi kepada publik. Perbedaan informasi yang diterima oleh publik akan menimbulkan persepsi yang salah dan mempengaruhi tindakan mereka selanjutnya. Tuntutan akan akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan sebagai sebuah media yang menyampaikan informasi kinerja keuangan perusahaan kepada publik, akan mengurangi kemungkinan terjadinya asimetri informasi. Asimetri informasi terjadi apabila ada perbedaan mengenai informasi yang disampaikan oleh internal perusahaan kepada pihak eksternal mengenai kondisi perusahaan (Ujiyantho, 2004). Persepsi yang berbeda dari pihak eksternal mengenai kondisi perusahaan yang sebenarnya, dapat mengakibatkan tindakan yang diambil selanjutnya kurang tepat. Pihak eksternal perusahaan dapat menggunakan informasi mengenai kinerja keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan untuk menentukan keputusan yang diambil terkait pendanaan dan investasi (Sutiyok dan Rahmawati, 2016).

Transparansi dan akuntabilitas perusahaan akan mendorong meningkatnya pengungkapan laporan keuangan yang dilakukan oleh perusahaan. Naim dan Rakhman (2000) menjelaskan bahwa pengungkapan wajib laporan keuangan (*Mandatory Disclosure*) dan pengungkapan sukarela laporan keuangan (*Voluntary Disclosure*) merupakan dua macam pengungkapan laporan keuangan yang dapat dilakukan oleh perusahaan. Pengungkapan yang minimal harus dilakukan oleh perusahaan untuk mematuhi peraturan dan standar yang berlaku disebut pengungkapan wajib, sedangkan untuk pengungkapan sukarela adalah suatu pengungkapan yang dilaporkan oleh perusahaan secara suka rela dalam laporan keuangan (Adina dan Ion, 2008). Tingkat rata-rata pengungkapan wajib yang dilakukan perusahaan di Indonesia dapat dikatakan masih rendah dan belum mendekati nilai ideal sebesar 100%. Hasil penelitian yang dilakukan Prawinandi *et al.* (2012) memberikan bukti bahwa rata-rata tingkat pengungkapan wajib di Indonesia hanya sebesar 69,9%.

Standar yang sama untuk dijadikan sebagai acuan dasar akan lebih memudahkan para pengguna laporan dalam membaca dan memahami laporan keuangan perusahaan (Gunawan dan Hendrawati, 2016). *International Financial Reporting Standard* (IFRS) sebagai salah satu standar yang banyak diadopsi oleh sebagian besar negara di dunia, telah diadopsi secara penuh di Indonesia sejak tahun 2012 (Gamayuni, 2009). Tuntutan global dalam dunia usaha melatarbelakangi mulai berlakunya standar IFRS di Indonesia dan mendorong perusahaan untuk bersaing meningkatkan kualitas laporan keuangan serta menciptakan *Good*

Corporate Governance (GCG) (Gunawan dan Hendrawati, 2016). Penerapan standar IFRS di Indonesia diharapkan mampu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas perusahaan dalam menyajikan laporan keuangan.

Penyajian laporan keuangan perusahaan harus sesuai dengan peraturan yang berlaku agar informasi tersampaikan dengan baik. Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) selaku pihak yang berwenang mengawasi perusahaan *Go Public* di Indonesia, telah mengeluarkan peraturan mengenai pengungkapan wajib laporan keuangan perusahaan bagi emiten. Berdasarkan Keputusan Ketua BAPEPAM No.: KEP-347/BL/2012, penyajian laporan keuangan emiten dan perusahaan publik diatur dalam peraturan No. VIII G.7 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten dan Perusahaan Publik. Peraturan mengenai penyajian laporan keuangan tersebut seharusnya dapat mendorong perusahaan publik untuk melakukan pengungkapan laporan keuangan hingga mendekati tingkat yang ideal sebesar 100%. Namun dalam pelaksanaannya, pengungkapan wajib laporan keuangan perusahaan di Indonesia masih rendah dan belum ada yang mencapai tingkat yang ideal. Hasil penelitian Prawinandi *et al.* (2012) mengenai tingkat pengungkapan wajib konvergensi IFRS di Indonesia, rata-rata tingkat pengungkapan wajib hanya mencapai angka 69,90%.

Semakin tinggi tingkat pengungkapan wajib laporan keuangan diharapkan dapat lebih mendorong semakin berkurangnya risiko dan ketidakpastian dalam pengambilan keputusan yang sering dihadapi oleh pengguna laporan keuangan (Murdoko *et al.*, 2007). Pengelolaan dan pengawasan internal perusahaan memerlukan sistem institusional yang berupa *corporate governance* agar pengungkapan informasi yang dilakukan oleh internal perusahaan memadai (Akhtaruddin *et al.*, 2009). *Corporate governance* yang efektif akan mendorong semakin tingginya transparansi informasi keuangan perusahaan kepada pemegang saham dan pihak lain (Juhmani, 2017). Transparansi informasi sebagai hasil *corporate governance* yang efektif akan mengurangi peluang asimetri informasi yang terjadi antara pihak internal dan eksternal perusahaan.

Struktur *corporate governance* yang dikatakan baik akan tercermin pada dewan komisaris perusahaan yang merupakan inti utama dari sebuah *corporate governance* itu sendiri (FCGI, 2001). Aspek-aspek lain dari *corporate governance* yang berupa anggota direksi dan komite audit berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap tingkat pengungkapan IFRS (Juhmani, 2017). Efektifitas dari aspek-aspek *corporate governance* tersebut diharapkan dapat mendorong tingkat pengungkapan informasi sebuah perusahaan ke tingkat yang lebih

ideal. Berdasarkan uraian dan penelitian sebelumnya yang telah dijelaskan, maka penelitian ini akan menguji dan menemukan informasi penting terkait peran dari aspek-aspek *corporate governance* dalam meningkatkan pengungkapan wajib pada laporan keuangan di Indonesia yang dipengaruhi oleh aspek-aspek *corporate governance* yang terdiri dari dewan komisaris, anggota direksi, dan komite audit.

KAJIAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Teori *Stakeholders*

Teori *stakeholders* oleh Donaldson dan Preston (1995) menyatakan bahwa perusahaan harus mempertimbangkan rekomendasi dari para *stakeholders* mengenai sikap, struktur, dan praktik yang diterapkan kepada perusahaan, yang kemudian disetujui bersama antara kedua pihak untuk memberikan kontribusi yang positif melalui kinerja ekonomi perusahaan. Dengan adanya teori *stakeholders*, perusahaan harus mempertimbangkan kepentingan dari para *stakeholder*, sehingga perusahaan beroperasi untuk kepentingan bersama antara perusahaan dan para *stakeholders*.

Perusahaan yang mempertimbangkan kepentingan dari para *stakeholders* akan mendorong pengungkapan laporan keuangan yang lebih luas. Kebutuhan informasi *stakeholder* mengenai kinerja perusahaan akan terpenuhi seiring dengan semakin luasnya pengungkapan yang dilakukan oleh perusahaan

Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan menurut Jensen dan Meckling (1976) menjelaskan bahwa dalam suatu perusahaan akan terjadi hubungan yang terikat dalam suatu perjanjian atau kontrak antara pemilik perusahaan dan pengelola perusahaan. Perjanjian atau kontrak yang terjadi di perusahaan tersebut akan mewajibkan agen sebagai pengelola perusahaan untuk memberikan sebuah jasa kepada para prinsipal atau pemilik perusahaan. Pendelegasian wewenang yang dilakukan oleh prinsipal kepada agen selaku pengelola perusahaan, secara tidak langsung akan membuat agen memiliki hak terkait pengambilan keputusan bisnis yang harus mengutamakan kepentingan pemilik. Tidak sejalannya kepentingan antara kedua belah pihak sering menimbulkan benturan antara kepentingan dari pihak prinsipal dan kepentingan dari pihak agen.

Sering terjadinya masalah berupa benturan kepentingan antara kedua belah pihak, mengharuskan perlunya pihak ketiga sebagai penengah antara pihak agen dan prinsipal. Fungsi dari pihak ketiga ini adalah sebagai pihak yang independen dalam melakukan pengawasan

terkait perilaku dari pihak agen agar dalam melakukan kewajibannya sebagai pengelola perusahaan sesuai dengan kepentingan pihak prinsipal. Independensi dari pihak ketiga ini sangat diperlukan oleh setiap perusahaan, termasuk sektor pertambangan dalam mendorong manajemen untuk melakukan pengungkapan informasi perusahaan yang lebih luas dan mengurangi risiko terjadinya asimetri informasi diantara kedua pihak.

Pengungkapan Wajib (*Mandatory Disclosure*)

Menurut Soewardjono (2005) pengungkapan wajib didefinisikan sebagai suatu syarat minimum untuk melakukan pengungkapan yang sesuai dengan standar akuntansi berlaku. Tujuan dilakukannya pengungkapan wajib adalah untuk memenuhi kebutuhan mengenai informasi bagi para pengguna dan memastikan adanya pengawasan kualitas mengenai kinerja perusahaan agar sesuai dengan standar yang berlaku (Adina dan Ion, 2008).

Di Indonesia, peraturan No. VIII G.7 yang dibuat oleh BAPEPAM-LK merupakan peraturan yang mengatur mengenai pengungkapan wajib laporan keuangan dan berlaku bagi seluruh perusahaan yang telah *listing* di Bursa Efek Indonesia (BEI). Informasi apa saja yang wajib diungkapkan dalam laporan keuangan bagi semua industri di pasar modal juga telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) agar mempermudah emiten dalam mentaati pengungkapan wajib.

Struktur *Corporate Governance*

Menurut *Forum for Corporate Governance in Indonesia* (FCGI) (2001) istilah *corporate governance* merujuk pada suatu sistem dan seperangkat aturan yang berfungsi untuk mengatur hubungan yang terjadi antara agen dan prinsipal mengenai hak-hak dan kewajiban mereka di perusahaan. Struktur *corporate governance* yang baik akan mendorong terjalannya hubungan yang baik antara kedua pihak di perusahaan.

Di Indonesia, struktur *corporate governance* yang digunakan oleh perusahaan-perusahaan adalah sistem dua tingkat (*Two Tiers System*) yang terdiri dari pihak pengawas (dewan komisaris) dan pihak pengelola (dewan direksi) (FCGI, 2001). Dengan menerapkan sistem ini, peran struktur *corporate governance* akan mampu mendorong perusahaan untuk mengelola hubungan yang lebih transparan antara agen dan prinsipal.

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Jumlah Anggota Dewan Komisaris terhadap Tingkat Pengungkapan Wajib Laporan Keuangan

Jumlah dewan komisaris dalam suatu perusahaan telah diatur dalam Undang-Undang No. 40 tahun 2007 mengenai Perseroan Terbatas yang menyebutkan bahwa dewan komisaris perusahaan minimal terdiri dari dua orang anggota. Fungsi dari dewan komisaris yang merupakan pengawas internal perusahaan, akan lebih memperhatikan kepentingan antara perusahaan dan pemegang saham (Muntoro, 2005).

Penelitian yang dilakukan Sutiyok dan Rahmawati (2016) juga menunjukkan bahwa jumlah anggota dari dewan komisaris perusahaan memiliki peran penting yang positif dalam meningkatkan tingkat pengungkapan yang dilakukan oleh perusahaan. Berdasarkan uraian-uraian tersebut, maka hipotesis yang dapat dikembangkan untuk penelitian ini adalah sebagai berikut.

H₁ : Jumlah anggota dewan komisaris perusahaan berpengaruh positif terhadap tingkat *mandatory disclosure* laporan keuangan perusahaan.

Pengaruh Proporsi dari Anggota Komisaris Independen terhadap Tingkat Pengungkapan Wajib Laporan Keuangan

Menurut Suhardjanto dan Afni (2009), komisaris independen merupakan anggota dewan komisaris yang direkrut dari eksternal perusahaan. Semakin banyak anggota komisaris independen di perusahaan, maka semakin banyak pihak yang meminta adanya transparansi laporan keuangan terhadap perusahaan dan dapat meningkatkan kualitas pengawasan pada perusahaan tersebut (Nasution dan Setiawan, 2007).

Anggota komisaris independen dibutuhkan oleh perusahaan dalam memperkuat independensi dari dewan komisaris mengenai pengawasan kepentingan *stakeholders* dan mampu mendorong perusahaan untuk lebih mengutamakan kepentingan perusahaan (Muntoro, 2005). Hasil penelitian sebelumnya yang membahas mengenai faktor-faktor pengungkapan wajib oleh Prawinandi *et al.* (2012), dan Gunawan dan Hendrawati (2016) memberikan bukti bahwa proporsi dari anggota komisaris independen di perusahaan secara positif dan signifikan mampu mendorong tingkat pengungkapan wajib ke angka yang lebih tinggi. Berdasarkan hasil penelitian dan uraian-uraian tersebut, maka penelitian ini akan mengembangkan hipotesis sebagai berikut.

H₂ : Proporsi dari anggota komisaris independen berpengaruh positif terhadap tingkat *mandatory disclosure* laporan keuangan perusahaan.

Pengaruh Latar Belakang Pendidikan Komisaris Utama terhadap Tingkat Pengungkapan Wajib Laporan Keuangan

Keputusan terkait *mandatory disclosure* laporan keuangan perusahaan merupakan salah satu keputusan yang harus diambil oleh dewan direksi (Prawinandi *et al.*, 2012). Dewan komisaris yang bertugas sebagai pengawas perusahaan akan memberikan masukan mengenai hal tersebut. Komisaris utama yang memiliki latar belakang pendidikan yang berasal dari pendidikan ekonomi dan bisnis dapat memberikan dampak positif dalam mengelola dan menentukan keputusan bisnis (Kusumastuti *et al.*, 2008).

Pengelolaan bisnis perusahaan yang lebih baik dapat mendorong meningkatkan tingkat pengungkapan wajib yang dilakukan perusahaan. Penelitian sebelumnya yang dilakukan Kharis dan Suhardjanto (2012) membuktikan bahwa tingkat pengungkapan yang dilakukan akan semakin tinggi ketika komisaris utama perusahaan berasal dari pendidikan ekonomi dan bisnis. Pengembangan hipotesis berdasarkan uraian di atas adalah sebagai berikut.

H3 : Latar belakang pendidikan komisaris utama perusahaan berpengaruh positif terhadap tingkat *mandatory disclosure* laporan keuangan.

Pengaruh Jumlah Anggota Direksi terhadap Tingkat Pengungkapan Wajib Laporan Keuangan

Berdasarkan Undang-Undang No.40 tahun 2007, anggota direksi terdiri dari dua orang atau lebih. Menurut Abeysekera (2010) ukuran dari direksi di perusahaan akan meningkatkan pengungkapan yang dilakukan oleh perusahaan.

Ukuran dewan direksi yang semakin besar di suatu perusahaan akan meningkatkan proses pengawasan, namun akan menurunkan efektifitas komunikasi dan proses pengambilan keputusan (John dan Senbet, 1998). Berdasarkan uraian tersebut, dapat dikembangkan hipotesis penelitian seperti berikut.

H4 : Jumlah anggota direksi perusahaan berpengaruh positif terhadap tingkat *mandatory disclosure* laporan keuangan.

Pengaruh Proporsi Direktur Independen terhadap Tingkat Pengungkapan Wajib Laporan Keuangan

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT.BEI No. Kep-00001/BEI/01-2014, direktur independen adalah direktur perusahaan yang tidak memiliki hubungan afiliasi dengan pengendali perusahaan, komisaris, dan direktur perusahaan tercatat serta tidak merangkap jabatan di perusahaan tercatat lainnya. Dalam Surat Edaran BEI No.: SE-00001/BEI/02-2014, istilah direktur tidak terafiliasi yang sebelumnya digunakan merupakan istilah lama dan digantikan dengan istilah baru yang sekarang disebut sebagai direktur independen.

Menurut Juhmani (2017) peningkatan proporsi direktur independen akan mengarah pada tingkat pengungkapan IFRS yang lebih luas. Chen dan Jaggi (2000) berpendapat bahwa direktur independen akan memberikan saran mengenai keputusan strategis, seperti luas pengungkapan kepada dewan perusahaan. Proporsi direktur independen yang tinggi akan mendorong terjadinya kontrol dan pengawasan yang lebih besar terhadap keputusan manajerial. Hipotesis yang dikembangkan berdasarkan uraian dan penelitian sebelumnya adalah sebagai berikut.

H5 : Proporsi anggota direktur independen berpengaruh positif terhadap tingkat *mandatory disclosure* laporan keuangan.

Pengaruh Jumlah Anggota Komite Audit terhadap Tingkat Pengungkapan Wajib Laporan Keuangan

Anggota dari komite audit perusahaan telah diatur dalam Peraturan OJK No.55/POJK.04/2015 yang mewajibkan perusahaan untuk memiliki anggota minimal sebanyak tiga orang dan terdiri dari seorang komisaris independen perusahaan dan anggota lainnya merupakan pihak eksternal perusahaan. Komite audit berfungsi untuk membantu melaksanakan tugas dan peran dari dewan komisaris.

Pengawasan praktik pelaporan keuangan yang lebih baik dapat ditingkatkan dengan semakin banyaknya jumlah anggota dan keahlian dari komite audit (Anderson *et al.*, 2004). Hasil penelitian Prawinandi *et al.* (2012) dan Gunawan & Hendrawati (2016) memperlihatkan hasil bahwa jumlah anggota komite audit secara positif akan meningkatkan pengungkapan wajib konvergensi IFRS. Penelitian yang dilakukan Felo *et al.* (2003) menunjukkan ukuran komite audite yang lebih besar secara positif signifikan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Berdasarkan penelitian sebelumnya yang telah dijelaskan, hipotesis yang dapat dikembangkan adalah sebagai berikut.

H₆ : Jumlah anggota komite audit berpengaruh positif terhadap tingkat *mandatory disclosure* laporan keuangan.

METODE PENELITIAN

Data sekunder yang digunakan sebagai sumber data untuk penelitian ini berupa data laporan keuangan dan laporan tahunan perusahaan *go public* sektor pertambangan dari tahun 2014 hingga 2016. Perolehan data yang akan digunakan melalui laman *website* resmi BEI, selain itu data yang digunakan juga didapatkan melalui laman *website* masing-masing perusahaan yang termasuk ke dalam sektor pertambangan. Perusahaan *go public* di sektor pertambangan yang sudah menerbitkan laporan keuangan dan laporan tahunan di BEI pada tahun 2014 hingga 2016 digunakan sebagai populasi utama penelitian.

Sektor pertambangan dipilih sebagai sampel penelitian dikarenakan penelitian mengenai pengungkapan laporan keuangan perusahaan di sektor pertambangan dirasa masih kurang dan jarang diperhatikan. *Checklist* mengenai pengungkapan laporan keuangan yang digunakan terdiri dari 156 item pengungkapan untuk sektor pertambangan dan 161 item pengungkapan untuk sub sektor minyak bumi dan gas.

Definisi Operasional Variabel

Variabel Dependen

Tingkat pengungkapan wajib laporan keuangan perusahaan digunakan sebagai variabel dependen. Pengungkapan wajib laporan keuangan perusahaan yang telah mematuhi peraturan dan standar yang berlaku merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas perusahaan kepada pihak eksternal. Pengukuran besarnya tingkat pengungkapan wajib laporan keuangan perusahaan dilakukan dengan menggunakan *checklist* item pengungkapan. *Checklist* pengungkapan laporan keuangan yang digunakan telah sesuai dengan Peraturan No.VIII G.7. *Checklist* item pengungkapan laporan keuangan yang digunakan terdiri dari 156 item pengungkapan untuk sektor pertambangan dan 161 item pengungkapan untuk sub sektor minyak bumi dan gas.

Indeks nilai yang digunakan untuk menunjukkan tingkat pengungkapan wajib laporan keuangan diukur berdasarkan jumlah item pengungkapan informasi yang dilaporkan oleh perusahaan berbanding dengan jumlah total keseluruhan item pengungkapan wajib laporan keuangan perusahaan yang wajib dilaporkan oleh perusahaan di sektor tersebut. Indeks nilai pengungkapan wajib laporan keuangan perusahaan dapat dirumuskan sebagai berikut.

$$MDI = \frac{\text{Jumlah item yang dilaporkan dalam laporan keuangan}}{\text{Total item pengungkapan wajib laporan keuangan sektor perusahaan}}$$

Variabel Independen

Jumlah Anggota Dewan Komisaris

Jumlah anggota dewan komisaris di Indonesia paling sedikit beranggotakan dua orang anggota dengan salah satu di antaranya merupakan dewan komisaris independen, hal tersebut telah ditetapkan dalam peraturan OJK No.: 33/POJK.4/2014. Komisaris perusahaan bertugas sebagai pengawas internal perusahaan dalam menjalankan kebijakan yang telah ditetapkan oleh direktur.

Pengukuran jumlah anggota dewan komisaris dihitung berdasarkan jumlah keseluruhan anggota dewan komisaris yang masih aktif menjabat di perusahaan, baik komisaris non-independen maupun komisaris independen perusahaan. Pengukuran anggota dewan komisaris dalam penelitian Prawinandi *et al.* (2012) dihitung berdasarkan keseluruhan anggota komisaris perusahaan.

Proporsi Anggota Dewan Komisaris Independen

Jumlah anggota komisaris independen diwajibkan sebanyak 30% dari jumlah keseluruhan anggota dewan komisaris perusahaan, hal ini berdasarkan peraturan OJK No.: 33/POJK.4/2014. Perekrutan komisaris independen perusahaan melalui eksternal perusahaan bertujuan untuk meningkatkan independensi internal perusahaan.

Penghitungan komisaris independen berdasarkan masa aktif jabatan selama tahun sampel penelitian. Pengukuran proporsi anggota komisaris independen yang digunakan sesuai dengan penelitian Prawinandi *et al.* (2012) yang membandingkan banyak komisaris independen dengan total keseluruhan komisaris yang menjabat, yaitu:

$$Kom.Independen = \frac{\text{Jumlah Anggota Komisaris Independen}}{\text{Jumlah Total Anggota Dewan Komisaris}}$$

Latar Belakang Pendidikan Komisaris Utama

Komisaris utama yang memiliki latar belakang pendidikan yang berasal dari ekonomi dan bisnis diharapkan memberi dampak positif terhadap pengungkapan wajib laporan keuangan (Suhardjanto dan Afni, 2009). Komisaris utama yang telah menempuh pendidikan di bidang ekonomi dan bisnis memiliki pengetahuan yang lebih luas perihal pelaporan keuangan perusahaan.

Informasi mengenai latar belakang pendidikan komisaris utama diketahui melalui profil dewan komisaris dalam laporan tahunan perusahaan. Variabel *dummy* digunakan untuk menggambarkan latar belakang pendidikan komisaris utama dengan kode 1 untuk yang berasal

dari ekonomi dan bisnis, sedangkan kode 0 digunakan untuk bidang selain ekonomi dan bisnis (Suhardjanto dan Miranti, 2009).

Jumlah Anggota Direksi

Minimal jumlah anggota dari direksi perusahaan yang diatur oleh OJK adalah dua orang anggota direksi. Salah satu anggota direksi yang ada di perusahaan harus diangkat sebagai presiden direktur atau direktur utama.

Pengukuran jumlah anggota direksi berdasarkan jumlah keseluruhan anggota direksi di perusahaan (Juhmani, 2017). Pengukuran jumlah anggota direksi dihitung berdasarkan jumlah keseluruhan dari anggota direksi yang masih aktif menjabat di perusahaan, baik direktur independen maupun direktur di setiap departemen atau divisi.

Proporsi Anggota Direksi Independen

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT.BEI, direktur independen yang ada di perusahaan setidaknya ada satu orang anggota. Syarat menjadi direktur independen adalah calon direktur independen perusahaan harus bersih dari adanya ikatan atau hubungan afiliasi dengan pihak-pihak yang dapat mempengaruhi independensinya, seperti pengendali perusahaan tercatat, direksi dan komisaris di perusahaan.

Rangkap jabatan di perusahaan tercatat lain dan menjadi orang dalam lembaga penunjang pasar modal juga termasuk hal yang tidak diperbolehkan bagi direktur independen perusahaan. Proporsi anggota direktur independen diukur berdasarkan perbandingan banyak anggota direksi independen dengan seluruh anggota direksi di perusahaan (Juhmani, 2017).

$$Dir. Independen = \frac{\text{Jumlah Direktur Independen}}{\text{Jumlah Total Anggota Direksi}}$$

Jumlah Anggota Komite Audit

Anggota komite audit di Indonesia setidaknya beanggotakan tiga orang. Salah satu anggota komite audit harus berasal dari komisaris independen perusahaan, sedangkan anggota lainnya merupakan pihak eksternal perusahaan yang independen.

Pengukuran jumlah anggota komite audit diukur berdasarkan angka yang menunjukkan jumlah individu dari anggota komite audit (Kharis dan Suhardjanto, 2012). Pencatatan anggota komite audit dicatat berdasarkan jumlah keseluruhan baik anggota maupun ketua komite audit yang masih aktif selama tahun sampel penelitian.

Teknik Analisis Data

Model analisis regresi berganda yang digunakan dalam uji hipotesis bertujuan untuk memperkirakan seberapa tinggi tingkat dari pengaruh variabel independen yang digunakan dalam penelitian terhadap variabel dependen yang berupa tingkat pengungkapan wajib. Persamaan regresi yang untuk penelitian ini adalah sebagai berikut ini.

$$Y = \beta + \beta_1X_1 + \beta_2X_2 + \beta_3X_3 + \beta_4X_4 + \beta_5X_5 + \beta_6X_6$$

Keterangan:

Y = Tingkat Pengungkapan wajib laporan keuangan, β = intersep,

$\beta_1, \beta_2, \beta_3$ = koefisien regresi,

X₁ = Jumlah anggota dewan komisaris,

X₂ = Proporsi anggota komisaris independen,

X₃ = Latar belakang pendidikan komisaris utama,

X₄ = Jumlah dewan direksi,

X₅ = Proporsi direktur independen, dan

X₆ = Jumlah anggota komite audit.

Sebelum uji analisis regresi dilakukan dalam penelitian ini, data harus melewati uji asumsi klasik untuk mengetahui apakah data yang akan digunakan layak untuk digunakan dalam pengujian. Uji asumsi klasik yang dilakukan berupa uji normalitas, uji multikolinieritas, uji autokorelasi, dan uji heterokedastisitas. Koefisien determinasi (R^2), uji simultan (Uji F), dan uji parsial (Uji t) digunakan dalam uji hipotesis untuk mengetahui hubungan dari variabel penelitian.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Uji Asumsi Klasik

Pengujian data dalam penelitian ini menggunakan SPSS 20. Sebanyak 36 perusahaan sektor pertambangan dari tahun 2014 hingga 2016 dipilih sebagai populasi penelitian. Seluruh perusahaan yang dijadikan sampel selama 3 tahun dapat menghasilkan 108 data penelitian. Dari 108 data yang ada, 8 data *outlier* dikeluarkan dari pengujian untuk mendapatkan data yang normal dan tersisa 100 data normal yang digunakan sebagai sampel pengujian dalam penelitian ini.

Uji Normalitas

Menurut Ghozali (2006) uji normalitas dibutuhkan untuk mengetahui apakah variabel data penelitian yang akan digunakan dalam model regresi terdistribusi dengan normal atau tidak. Model regresi yang

memiliki distribusi data normal atau mendekati normal dapat dikatakan model regresi yang baik. Uji *Kolmogorof-Smirnov* (Uji K-S) yang dilakukan dalam penelitian ini digunakan sebagai uji normalitas. Data penelitian dikatakan terdistribusi secara normal apabila memiliki tingkat signifikansi $>5\%$.

Tabel 1
Hasil Uji Normalitas

	<i>Unstandardized Residual</i>
N	100
<i>Kolmogorof-Smirnov Z</i>	0,702
<i>Asymp. Sig. (2-tailed)</i>	0,707

Sumber: Pengolahan Data SPSS, 2018

Tabel 1 menunjukkan hasil dari pengujian normalitas data penelitian dari 100 data yang digunakan. Hasil Uji K-S yang dilakukan menunjukkan nilai 0,702 dengan angka tingkat signifikansi sebesar 0,707. Hasil ini membuktikan bahwa tingkat signifikansi data penelitian di atas 0,05 sehingga data yang digunakan memenuhi kriteria sebagai data yang terdistribusi secara normal.

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dimaksudkan untuk mendeteksi gejala korelasi antar variabel independen yang digunakan dalam penelitian. Model regresi dapat dikatakan baik apabila tidak mengalami gejala korelasi antar variabel independen penelitian. Uji multikolinieritas data penelitian dilakukan dengan dua metode, yaitu dengan melihat nilai VIF (*Variance Inflation Factors*) dan nilai *tolerance* dari hasil pengujian yang dilakukan. Jika nilai VIF bernilai > 10 dan nilai *tolerance* sebesar $< 0,10$ maka dapat dikatakan terjadi gejala Multikolinieritas pada variabel penelitian (Ghozali, 2006).

Tabel 2
Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	Nilai <i>Tolerance</i>	<i>VIF</i>	Keterangan	
Komisaris	0,765	1,307	Tidak	terjadi
Kom. Independen	0,935	1,069	Tidak	terjadi
Pend. Komisaris	0,983	1,017	Tidak	terjadi
Direktur	0,716	1,396	Tidak	terjadi
Dir. Independen	0,679	1,472	Tidak	terjadi
Komite Audit	0,742	1,348	Tidak	terjadi

Sumber: Pengolahan Data SPSS, 2018

Tabel 2 memperlihatkan hasil dari uji multikolinearitas variabel independen data penelitian yang digunakan. Hasil dari setiap nilai *tolerance* dan nilai VIF dari variabel independen telah memenuhi kriteria sebagai variabel yang tidak mengalami gejala multikolinearitas. Nilai *tolerance* dari setiap variabel telah menunjukkan nilai lebih dari 0,1 dan nilai VIF juga menunjukkan nilai kurang dari 10, sehingga variabel independen yang digunakan dapat dikatakan tidak mengalami gejala multikolinearitas.

Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui apakah model regresi linier mengalami korelasi atau tidak antara linier pengganggu pada periode tahun sampel dengan kesalahan pengganggu dalam periode sebelumnya (Ghozali, 2011). Uji autokorelasi dapat menggunakan metode pengujian *Run Test*. Pengujian ini digunakan untuk menunjukkan ada atau tidaknya data residual yang terjadi secara random atau tidak sistematis. Pengujian *Run Test* variabel independen akan diterima jika nilai signifikansi $> 0,05$.

Tabel 3
Hasil Uji *Runs Test*

	<i>Unstandardized Residual</i>
<i>Test Value^a</i>	,00085
<i>Cases < Test Value</i>	50
<i>Cases >= Test Value</i>	50
<i>Total Cases</i>	100
<i>Number of Runs</i>	42
<i>Z</i>	-1,809
<i>Asymp. Sig. (2-tailed)</i>	,070

Sumber: Pengolahan Data SPSS, 2018

Tabel 3 menunjukkan hasil dari pengujian autokorelasi variabel independen data penelitian. Hasil nilai signifikansi Uji *Run Test* telah menunjukkan nilai sebesar 0,07. Nilai signifikansi uji *Run Test* yang telah menunjukkan nilai $>0,05$ membuktikan bahwa tidak terjadinya autokorelasi pada variabel independen penelitian ini.

Uji Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas dilakukan untuk menguji ada tidaknya kesamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain pada regresi yang digunakan. Salah satu cara melakukan uji heterokedastisitas adalah melalui uji *Glesjer*. Probabilitas signifikansi

dari setiap variabel independen penelitian yang memiliki nilai $> 0,05$ akan membuktikan bahwa tidak terjadi heterokedastisitas pada model regresi (Ghozali, 2006).

Tabel 4
Hasil Uji Heterokedastisitas

Model	T	Sig
Komisaris	-1,926	0,057
Kom. Independen	0,073	0,942
Pend. Komisaris	-0,489	0,626
Direktur	-0,122	0,903
Dir. Independen	1,625	0,108
Komite Audit	0,485	0,628

Dependent Variable: Abs_Res

Sumber: Pengolahan Data SPSS, 2018

Hasil uji heterokedastisitas dari variabel independen dengan uji *Glesjer* pada tabel 4 menunjukkan nilai signifikansi setiap variabel independen $>0,05$. Berdasarkan nilai signifikansi setiap variabel independen penelitian yang telah memenuhi kriteria, maka dapat dibuktikan bahwa tidak adanya heterokedastisitas pada variabel independen penelitian ini.

Uji Hipotesis

Analisis Regresi Linier Berganda

Uji hipotesis pada penelitian ini dapat dilakukan setelah melewati serangkaian uji asumsi klasik dalam membuktikan kelayakan data yang akan digunakan dalam penelitian. Pengaruh variabel independen dalam menjelaskan dependen penelitian dapat diketahui melalui uji analisis regresi.

Uji analisis regresi digunakan untuk menarik kesimpulan berdasarkan hipotesis yang telah diambil sebelumnya. Metode yang dipilih untuk uji analisis regresi penelitian ini adalah metode regresi linier berganda.

Uji Koefisien Determinasi

Pengujian ini dilakukan untuk memperlihatkan seberapa besar kemampuan variabel independen penelitian dalam menjelaskan pengaruhnya terhadap variabel dependen. Seberapa besar pengaruhnya dapat dilihat dalam hasil pengujian melalui nilai koefisien determinasi yang merupakan besaran nilai *Adjusted R²*. Variabel independen yang memiliki nilai koefisien determinasi dengan nilai yang semakin mendekati

nilai 1 menunjukkan kemampuan dalam menjelaskan variasi variabel dependen yang semakin baik (Ghazali, 2011).

Tabel 5
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,575 ^a	0,331	0,288	0,3077

a. Prediktor: Konstan, Komisaris, Kom. Independen, Pend. Komisaris, Direktur, Dir. Independen, Komite Audit.

b. Variabel Dependen : *Mand. Disclosure*

Sumber: Pengolahan Data SPSS, 2018

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi pada tabel 5, dijelaskan bahwa nilai *adjusted R²* dari seluruh variabel independen penelitian sebesar 0,288. Nilai tersebut menunjukkan bahwa sebanyak 28,8% variasi pengungkapan wajib laporan keuangan dijelaskan oleh variasi enam variabel independen penelitian ini, sedangkan nilai sisa sebesar 71,2% dijelaskan oleh faktor dan variabel lain yang tidak diuji dan digunakan dalam penelitian ini.

Uji Simultan (Uji F)

Hasil uji simultan pada tabel 6 menunjukkan nilai *F* hitung sebesar 7,674 dengan tingkat signifikansi yang menunjukkan angka sebesar 0,000. Besaran nilai signifikan yang termasuk ke dalam nilai <0,05 membuktikan bahwa semua variabel independen penelitian ini secara bersama-sama dapat mempengaruhi variabel dependen yang berupa pengungkapan wajib laporan keuangan.

Tabel 6
Hasil Uji Simultan

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
Regression	0,044	6	0,007	7,674	0,000 ^b
Residual	0,088	93	0,001		
Total	0,132	99			

a. Variabel Dependen : *Mand. Disclosure*

b. Prediktor: Konstan, Komisaris, Kom. Independen, Pend. Komisaris, Direktur, Dir. Independen, Komite Audit.

Sumber: Pengolahan Data SPSS, 2018

Signifikansi dari hasil pengujian ini juga dapat memberikan indikasi mengenai model regresi yang digunakan dalam penelitian ini layak. Tingkat pengaruh dari setiap variabel independen terhadap dependen penelitian akan ditunjukkan melalui pengujian berikutnya.

Uji Parsial (Uji t)

Hasil uji parsial pada Tabel 7 membuktikan bahwa variabel independen yang berupa Komisaris memiliki nilai signifikansi $< 0,05$. Hal ini membuktikan bahwa variabel jumlah anggota komisaris berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat pengungkapan wajib laporan keuangan. Nilai t_{hitung} untuk variabel jumlah anggota komisaris yang menunjukkan nilai positif sebesar 3,835 membuktikan bahwa jumlah anggota komisaris secara signifikan berdampak positif dalam meningkatkan pengungkapan wajib laporan keuangan yang dilakukan perusahaan. Berdasarkan besaran nilai tersebut, maka hipotesis pertama (H_1) pada penelitian ini diterima.

Tabel 7
Hasil Uji Parsial

Variabel	<i>Unstandardized Coefficients</i>		<i>Standardized Coefficients</i>		Sig.
	B	Std. Error	Beta	t	
Konstan	0,667	0,033		20,034	0,000
Komisaris	0,009	0,002	0,372	3,835	0,000
Kom. Independen	-0,047	0,024	-0,172	-1,968	0,052
Pend. Komisaris	0,021	0,006	0,288	3,369	0,001
Direktur	-0,002	0,002	0,077	-0,770	0,443
Dir. Independen	0,013	0,011	0,119	1,157	0,250
Komite Audit	0,019	0,010	0,183	1,859	0,066

Variabel Dependen : *Mand. Disclosure*

Sumber: Pengolahan Data SPSS, 2018

Nilai signifikansi pada variable Komisaris Independen menunjukkan nilai 0,052 dengan nilai t_{hitung} sebesar -1,968. Nilai signifikansi tersebut di atas batas nilai signifikan 0,05 sehingga hasil ini dapat digunakan untuk membuktikan bahwa proporsi dari anggota komisaris independen pada perusahaan tidak berpengaruh dalam meningkatkan tingkat pengungkapan wajib laporan keuangan dan hipotesis kedua (H_2) ditolak. Hasil pengujian pada variabel Pendidikan Komisaris menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,001 dan nilai t_{hitung} menunjukkan angka sebesar 3,369. Nilai tersebut menunjukkan bahwa

komisaris utama yang berlatar belakang pendidikan ekonomi dan bisnis berpengaruh positif dan secara signifikan meningkatkan pengungkapan wajib laporan keuangan perusahaan sehingga hipotesis ketiga diterima. Sementara hasil pengujian pada tiga variabel lain yaitu Direktur, Direktur Independen, dan Komite Audit memiliki nilai signifikansi sebesar 0,443; 0,250; dan 0,066. Nilai signifikansi pada ketiga variabel tersebut masih di atas 0,05 sehingga ketiga variabel tersebut tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan wajib laporan keuangan. Berdasarkan nilai signifikansi tersebut, maka hipotesis keempat (H4), kelima (H5) dan keenam (H6) ditolak.

Pembahasan

Pengaruh Jumlah Anggota Dewan Komisaris terhadap Tingkat Pengungkapan Wajib Laporan Keuangan

Hasil pengujian untuk hipotesis pertama dengan variabel Komisaris menghasilkan kesimpulan bahwa jumlah anggota dari dewan komisaris perusahaan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan dalam meningkatkan pengungkapan laporan keuangan perusahaan di sektor pertambangan. Hasil penelitian ini memperkuat bukti dalam penelitian Sutiyok dan Rahmawati (2016) yang menunjukkan jumlah anggota dewan komisaris mampu meningkatkan pengungkapan wajib konvergensi IFRS secara positif.

Hasil penelitian ini berlainan dengan yang sebelumnya dilakukan oleh Prawinandi *et al.* (2012) dan Gunawan dan Hendrawati (2016) yang menunjukkan jumlah anggota dewan komisaris tidak mempengaruhi besarnya tingkat pengungkapan wajib yang dilakukan. Kesimpulan yang dapat dihasilkan adalah semakin banyaknya jumlah anggota dan semakin besar ukuran dewan komisaris pada perusahaan pertambangan, maka tuntutan dari dewan komisaris mengenai pelaksanaan pengungkapan wajib kepada direktur perusahaan juga akan semakin besar.

Pengaruh Proporsi dari Anggota Komisaris Independen terhadap Tingkat Pengungkapan Wajib Laporan Keuangan

Hasil pengujian pada hipotesis yang kedua dengan variabel proporsi komisaris independen membuktikan bahwa proporsi anggota komisaris independen tidak berdampak secara signifikan terhadap variabel dependen. Hasil ini tidak sesuai dan bahkan bertolak belakang dengan penelitian Prawinandi *et al.* (2012) dan Gunawan dan Hendrawati (2016) yang menunjukkan bahwa proporsi dari anggota komisaris independen di perusahaan secara positif dan signifikan berdampak

terhadap meningkatnya pengungkapan wajib konvergensi IFRS yang dilakukan perusahaan.

Hasil penelitian ini konsisten dengan yang sebelumnya dilakukan oleh Utami *et al.* (2012) yang menunjukkan proporsi dari anggota komisaris independen tidak memiliki pengaruh terhadap variabel dependen penelitian yang berupa pengungkapan wajib konvergensi IFRS pada perusahaan manufaktur. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa besarnya proporsi anggota komisaris independen dalam dewan komisaris secara signifikan tidak mampu mendorong besarnya tuntutan transparansi dari eksternal perusahaan mengenai pengungkapan informasi keuangan perusahaan.

Pengaruh Latar Belakang Pendidikan Komisaris Utama terhadap Tingkat Pengungkapan Wajib Laporan Keuangan

Hasil pengujian hipotesis penelitian yang ketiga dengan variabel independen berupa latar belakang pendidikan seorang komisaris utama menunjukkan bahwa seorang komisaris utama yang berasal dari bidang ekonomi atau bisnis secara positif dan signifikan mampu meningkatkan pengungkapan wajib laporan keuangan perusahaan sektor pertambangan. Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil dari penelitian sebelumnya oleh Kharis dan Suhardjanto (2012) yang memperlihatkan hasil bahwa seorang komisaris utama yang memiliki latar belakang pendidikan ekonomi atau bisnis secara positif mampu meningkatkan pengungkapan wajib perusahaan.

Hasil penelitian ini bertolak belakang dengan hasil penelitian Prawinandi *et al.* (2012), Gunawan dan Hendrawati (2016), dan Utami *et al.* (2012) yang menunjukkan bukti tidak adanya pengaruh mengenai latar belakang pendidikan seorang komisaris dalam meningkatkan tingkat pengungkapan wajib. Hasil penelitian ini mampu memberikan bukti bahwa seorang komisaris utama yang berasal dari bidang ekonomi atau bisnis mampu meningkatkan tingkat pengungkapan wajib laporan keuangan perusahaan pertambangan. Hal ini membuktikan bahwa pemilihan komisaris utama yang berasal dari pendidikan di bidang ekonomi atau bisnis akan lebih berdampak positif dalam memberikan masukan-masukan kepada direktur mengenai keputusan yang diambil terkait pengungkapan wajib laporan keuangan.

Pengaruh Jumlah Anggota Direksi terhadap Tingkat Pengungkapan Wajib Laporan Keuangan

Hasil pengujian hipotesis keempat dengan variabel Direktur membuktikan bahwa jumlah anggota direksi tidak mampu memberikan pengaruh yang signifikan dalam meningkatkan tingkat pengungkapan

wajib laporan keuangan perusahaan pertambangan. Hasil ini sesuai dan mendukung hasil penelitian Juhmani (2017) yang membuktikan tingkat pengungkapan IFRS secara signifikan tidak dipengaruhi oleh banyaknya anggota direksi.

Hasil ini bertolak belakang dengan hasil penelitian Abeysekera (2010) yang membuktikan bahwa ukuran dewan direksi secara positif mampu mendorong tingkat pengungkapan yang lebih baik. Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat diindikasikan bahwa ukuran dewan direksi perusahaan yang semakin besar akan membuat semakin lemahnya koordinasi dan efektifitas komunikasi direktur perusahaan dalam menentukan keputusan terkait pengungkapan wajib yang akan dilakukan perusahaan.

Pengaruh Proporsi Direktur Independen terhadap Tingkat Pengungkapan Wajib Laporan Keuangan

Hasil pengujian kelima dengan variabel independen berupa proporsi anggota direktur independen membuktikan bahwa proporsi dari anggota direktur independen di perusahaan tidak memiliki pengaruh dalam meningkatkan tingkat pengungkapan wajib. Hasil ini sesuai dan mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Leung dan Horwitz (2004) yang menunjukkan proporsi dari anggota direktur independen yang lebih besar tidak berpengaruh terhadap pengungkapan.

Hasil dari penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian Juhmani (2017) yang menunjukkan bahwa proporsi anggota direktur independen mampu mendorong tingkat pengungkapan yang lebih luas. Hal ini membuktikan bahwa proporsi direktur independen yang besar di perusahaan tidak mampu meningkatkan kontrol dan pengawasan mengenai keputusan manajerial terkait pengungkapan wajib laporan keuangan yang dilakukan perusahaan. Peraturan mengenai diwajibkan adanya direktur independen di perusahaan oleh BEI saat ini belum dirasa efektif untuk meningkatkan pengungkapan wajib laporan perusahaan.

Pengaruh Jumlah Anggota Komite Audit terhadap Tingkat Pengungkapan Wajib Laporan Keuangan

Hasil untuk pengujian hipotesis yang keenam dengan variabel jumlah anggota komite audit menunjukkan bahwa tingkat pengungkapan wajib laporan keuangan secara signifikan tidak dipengaruhi oleh jumlah anggota dari komite audit. Hasil ini bertolak belakang dengan penelitian Prawinandi *et al.* (2012) dan Gunawan dan Hendrawati (2016) yang membuktikan bahwa banyaknya anggota dari komite audit mampu meningkatkan kualitas laporan keuangan dan pengungkapan wajib konvergensi IFRS.

Hasil penelitian ini memperkuat bukti penelitian sebelumnya oleh Sutyok dan Rahmawati (2016) serta penelitian Kharis dan Suhardjanto (2012) yang menunjukkan tidak adanya pengaruh mengenai ukuran komite audit dalam mendorong pengungkapan wajib yang lebih baik. Hal ini membuktikan bahwa banyaknya anggota dari komite audit tidak mampu memberikan dampak yang positif dan signifikan dalam meningkatkan pengawasan internal terkait keputusan yang diambil mengenai pengungkapan wajib laporan keuangan yang dilakukan perusahaan.

SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Simpulan

Tujuan dilakukannya penelitian mengenai peran penting *corporate governance* terhadap tingkat pengungkapan wajib laporan keuangan ini adalah untuk mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh dari beberapa aspek-aspek *corporate governance* yang terdiri dari jumlah anggota dewan komisaris, proporsi dari anggota komisaris independen, latar belakang pendidikan komisaris utama, jumlah anggota direksi, proporsi dari anggota direktur independen, dan jumlah anggota komite audit terhadap tingkat pengungkapan wajib laporan keuangan perusahaan pertambangan di Indonesia. Pengambilan sampel penelitian dilakukan berdasarkan informasi yang diungkapkan pada laporan keuangan dan laporan tahunan 36 perusahaan pertambangan dari tahun 2014 hingga 2016. Sampel yang didapatkan sebanyak 108 data namun karena mengalami masalah uji asumsi klasik maka sebanyak 8 data *outlier* dihapuskan dari sampel pengujian, sehingga didapatkan 100 data yang digunakan untuk pengujian.

Berdasarkan hasil pengujian data, koefisien determinasi dari variabel independen penelitian adalah sebesar 28,8%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa sebanyak 28,8% dari keseluruhan faktor yang mampu meningkatkan tingkat pengungkapan wajib laporan keuangan, disebabkan oleh aspek-aspek *corporate governance* yang diuji dalam penelitian ini. Pengujian data yang digunakan juga menunjukkan bahwa jumlah anggota dewan komisaris dan latar belakang pendidikan komisaris utama secara positif dan signifikan mampu meningkatkan pengungkapan wajib laporan keuangan yang dilakukan oleh perusahaan pertambangan di Indonesia ke arah yang lebih baik. Variabel independen lain yang berupa proporsi anggota komisaris independen, jumlah anggota direktur, proporsi dari anggota direktur independen, dan komite audit yang diuji dalam penelitian ini menunjukkan hasil bahwa variabel-variabel tersebut secara signifikan tidak mampu mendorong

tingkat pengungkapan wajib laporan keuangan perusahaan pertambangan di Indonesia ke arah yang lebih baik.

Hasil dari penelitian ini memiliki implikasi bagi akademisi untuk menambah pengetahuan mengenai pengaruh dari aspek-aspek *corporate governance* terhadap tingkat pengungkapan wajib laporan keuangan perusahaan. Studi ini dapat digunakan untuk acuan pada penelitian selanjutnya yang menguji pengaruh *corporate governance* dalam mendorong pengungkapan wajib laporan keuangan yang lebih luas. Bagi lembaga pemerintah terkait, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan untuk mengevaluasi peraturan terkait *corporate governance* dan meningkatkan pengawasan terhadap perusahaan dalam meningkatkan pengungkapan wajib laporan keuangan. Bagi perusahaan, hasil penelitian ini dapat meningkatkan pengawasan dan pemahaman terkait *corporate governance* dalam mendorong tingkat pengungkapan wajib laporan keuangan di perusahaan yang lebih baik.

Keterbatasan

Keterbatasan yang dimiliki dalam penelitian ini adalah data terbatas hanya berasal dari 36 perusahaan di sektor pertambangan yang telah terdaftar di BEI dan menggunakan periode tiga tahun (2014-2016). Objek dari penelitian merupakan perusahaan pertambangan sehingga tidak dapat digeneralisasikan dengan perusahaan di sektor lain. Peraturan mengenai direktur independen yang ditetapkan oleh BEI mulai diberlakukan dari tahun 2014, sehingga penelitian ini dilakukan ketika peraturan baru berlaku selama 3 tahun di Indonesia dan dampak bagi perusahaan dari diberlakukannya peraturan tersebut mungkin masih belum terlihat di 3 tahun pertama.

Saran

Saran bagi penelitian selanjutnya adalah untuk memperluas sampel perusahaan di sektor lain, menambah periode penelitian, dan menambah variabel independen lainnya seperti karakteristik perusahaan (Hossain, 2008) dan aspek *corporate governance* lain yang berupa rangkap jabatan *CEO* (Juhmani, 2017) yang diperkirakan akan lebih mempengaruhi tingkat pengungkapan wajib laporan keuangan.

DAFTAR PUSTAKA

Adina, P., & Ion, P. 2008. Aspects Regarding Corporate Mandatory and Voluntary Disclosure. *Annals of the University of Oradea: Economic Science*, 3(1), 1407-1411.

- Akhtaruddin, M., Hossain, M. A., Hossain, M., & Yao, L. 2009. Corporate Governance and Voluntary Disclosure in Corporate Annual Reports of Malaysian Listed Firms. *Journal of Applied Management Accounting Research*, 7(1), 1.
- Donaldson, T., & Preston, L. E. 1995. The Stakeholder Theory of The Corporation: Concepts, evidence, and implications. *Academy of management Review*, 20(1), 65-91.
- Felo, A. J., Krishnamurthy, S., & Solieri, S. A. 2003. Audit Committee Characteristics and The Perceived Quality of Financial Reporting: an Empirical Analysis.
- Forum for Corporate Governance in Indonesia. 2001. Peran Dewan Komisaris dan Komite Audit dalam Pelaksanaan Corporate Governance. *Seri Tata Kelola Perusahaan (Corporate Governance) Jilid II* (2).
- Gamayuni, R. R. 2009. Perkembangan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia Menuju International Financial Reporting Standards. *Jurnal Akuntansi dan keuangan*, 14(2), 153-166.
- Ghozali, I. 2006. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS. *Badan Penerbit Universitas Diponegoro*.
- _____. 2011. Analisis Multivariate Program IBM SPSS 19. *Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro*.
- Gunawan, B., & Hendrawati, E. R. 2016. Peran Struktur Corporate Governance dalam Tingkat Kepatuhan Pengungkapan Wajib Periode Setelah Konvergensi IFRS (Studi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia). *Berkala Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 1(1).
- Hossain, M. 2008. The Extent of Disclosure in Annual Reports of Banking Companies: The case of India.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. 1976. Theory of The Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305-360.
- John, K., & Senbet, L. W. 1998. Corporate Governance and Board Effectiveness1. *Journal of Banking & Finance*, 22(4), 371-403.
- Juhmani, O. 2017. Corporate Governance and The Level of Bahraini Corporate Compliance with IFRS Disclosure. *Journal of Applied Accounting Research*, 18(1), 22-41.
- Kharis, A. & Suhardjanto, D. 2012. Corporate Governance dan Ketaatan Pengungkapan Wajib pada Badan Usaha Milik Negara. *Jurnal keuangan dan Perbankan*, 16(1).
- Kusumastuti, S., Supatmi, S., & Sastra, P. 2008. Pengaruh Board Diversity Terhadap Nilai Perusahaan dalam Perspektif Corporate Governance. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 9(2), pp-88.
- Leung, S. & Horwitz, B. 2004. Director Ownership and Voluntary Segment Disclosure: Hong Kong Evidence. *Journal of International Financial Management & Accounting*, 15(3), 235-260.

- Muntoro, R. K. 2005. Membangun Dewan Komisaris yang Efektif. *Artikel Lembaga Management Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia*.
- Nasution, M. & Setiawan, D. 2007. Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Manajemen Laba di Industri Perbankan Indonesia. *Makalah Simposium Nasional Akuntansi X*.
- Prawinandi, W., Suhardjanto, D., & Triatmoko, H. 2012. Peran Struktur Corporate Governance dalam Tingkat Kepatuhan Mandatory Disclosure Konvergensi IFRS. *Simposium Nasional Akuntansi XV Banjarmasin*, 20-23.
- Sutiyok, S. & Rahmawati, E. 2016. Pengaruh Mekanisme Corporate Governance Terhadap Tingkat Kepatuhan Mandatory Disclosure Konvergensi IFRS di Perbankan. *Jurnal Akuntansi dan Investasi*, 15(2), 151-162.
- Suhardjanto, D. & Afni, A. N. 2009. Praktik Corporate Social Disclosure di Indonesia Studi Empiris di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Akuntansi*, 13(3), 243-364.
- Ujiyantho, M. A. 2004. Asimetri Informasi dan Manajemen Laba: Suatu Tinjauan dalam Hubungan Keagenan. *Simposium Nasional Akuntansi*.
- Utami, W. D., Suhardjanto, D., & Hartoko, S. 2012. Investigasi Dalam Konvergensi IFRS di Indonesia: Tingkat Kepatuhan Pengungkapan Wajib dan Kaitannya dengan Mekanisme Corporate Governance. *Simposium Nasional Akuntansi XV Banjarmasin*, 20-23.